

Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Tanggung Jawab Pendeteksian Kecurangan Terhadap Pencegahan Kegagalan Audit

Dina Monalisa

dina.monalisa@mercubuana.ac.id, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Article Informatin:

Keywords:
*Independence;
Competence;
Responsibility Fraud Detection;
Prevention Failure Audit*

Article History:

Submitted : 2021-08-05
Revised : 2022-06-14
Accepted : 2022-07-22

Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/jpma.v2i1.12775>

Abstract

Audit failures caused by accounting scandals in recent years were caused by not applying generally accepted auditing standards, including the lack of independence, competence, and responsibility of auditors in detecting audit failures. This study aims to determine how much influence the independence, competence, and responsibility of fraud detection have on the prevention of audit failure. The object of research includes independence, competence, and responsibility for fraud detection as independent or independent variables which are seen as having an effect on the dependent or dependent variable, namely the prevention of audit failure. This research method uses a descriptive research method with the type of relationship between the variables studied is a clause relationship. Variables were analyzed using descriptive statistics, path analysis, and SPSS 17 as a data processing tool. The data collected was obtained through the distribution of questionnaires, with auditors as respondents at KAP in Jakarta. The results show that the independence, competence, and responsibility for detecting fraud either simultaneously or partially have a significant effect on the prevention of audit failure.

Abstrak

Kegagalan audit yang diakibatkan oleh skandal akuntansi dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan tanpa menerapkan standar audit yang dapat diterima umum, diantaranya disebabkan oleh kurangnya sikap independensi, kompetensi dan tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kegagalan audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi, kompetensi dan tanggungjawab pendeteksian ecurangan terhadap pencegahan kegagalan audit. Objek penelitian meliputi independensi, kompetensi, dan tanggungjawab pendeteksian kecurangan sebagai variabel bebas atau independen yang dilihat pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas atau dependen yaitu pencegahan kegagalan audit. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan tipe hubungan antara variabel yang diteliti adalah hubungan klausul. Variabel dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis jalur (Path Analysis) serta SPSS 17 sebagai alat pengolahan data. Data yang terkumpul diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dengan responden auditor pada KAP yang ada di Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, dan tanggungjawab untuk pendeteksian kecurangan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kegagalan audit.

Katakunci: Independensi; Kompetensi; Tanggung jawab Pendeteksian Kecurangan; Pencegahan Kegagalan Audit

PENDAHULUAN

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang unik karena dalam menjalankan tugas profesinya seorang akuntan publik harus bisa menggunakan keahlian profesinya dengan tetap mempertahankan sikap independensi (Karyadi, 2017). Berbeda dengan profesi lainnya yang harus mentaati perintah atau keinginan pengguna jasa profesi karena fee yang diberikan,

How to cite this article:

Monalisa, D. (2022). Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Tanggung Jawab Pendeteksian Kecurangan terhadap Pencegahan Kegagalan Audit. *Jurnal Pena-Mas Akuntansi*, 2(1), 1-8. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/jpma.v2i1.12775>

seorang akuntan publik justru harus independen dalam melaksanakan audit dan saat memberikan hasil laporan audit kepada klien, meskipun dibayar oleh klien karena hasil laporan audit ini tidak hanya digunakan oleh klien tetapi juga oleh pengguna laporan keuangan auditan (Saifudin, & Ayuningtias, 2020). Kemudian, Imam Ghozali & Ivan (2006) juga menyatakan bahwa profesi auditor sedikit berbeda dengan profesi lain seperti pengacara atau dokter. Pengacara atau dokter, sebagai pihak pertama, bekerja untuk kepentingan klien sebagai pihak ke dua yang merupakan pihak pemohon jasa. Namun auditor bukan saja dituntut untuk melayani klien (pihak ke dua) tetapi auditor juga dituntut untuk melayani masyarakat (pihak ke tiga).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tanggung jawab utama auditor justru bukan pada klien sebagai pemohon jasa (pihak kedua) akan tetapi pada pihak ke tiga atau pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut seperti *stakeholders* (Purwaningsih, 2018). Adanya tugas tersebut tidak serta merta menempatkan auditor pada posisi yang nyaman. Hal ini dikarenakan salah satu pekerjaan auditor adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan (*stakeholders*) mengenai penilaian dari isi laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, pengguna jasa audit mengharapkan agar auditor dapat menjalankan perannya dengan tetap menjaga sikap independensi, kompetensi dan tanggungjawab dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan (Purwaningsih, 2018; Saifudin, & Ayuningtias, 2020). Jika seorang auditor tidak memiliki sikap independensi, kompetensi tanggungjawab dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan maka akan mengakibatkan terjadinya kecurangan. Dimana kecurangan tersebut dapat dikatakan sebagai kegagalan audit (audit failure) (Rahim, et.al., 2020). Sheldon (1996) menyatakan kegagalan audit terjadi karena suatu audit dilaksanakan dengan tidak atau tanpa menerapkan standar audit yang dapat diterima umum (*generally accepted auditing standard*). Berdasarkan pejelasan tersebut, maka untuk dapat mencegah kegagalan audit maka seorang auditor harus memiliki sikap Independensi, Kompetensi dan tanggungjawab untuk mendeteksi kecurangan.

Beberapa kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang disebabkan oleh kurangnya sikap independensi, kompetensi dan tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kegagalan audit, yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Kasus seperti itu terjadi pada Enron, Global Crossing, Worldcom di Amerika Serikat yang mengakibatkan kegemparan besar dalam pasar modal. Kasus serupa terjadi di Indonesia seperti PT Kimia Farma. Meski beberapa salah saji yang terjadi belum tentu terkait dengan kecurangan, tetapi faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan kecurangan oleh manajemen terbukti ada pada kasus-kasus ini. Sebagai contoh di Indonesia dapat dikemukakan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (PT KF). PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) (Bappepam, 2002). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bappepam menilai (*mereview*) bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar (Bappepam, 2002). Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma,

melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut (Priyano, 2016). Konteks skandal keuangan tersebut akhirnya memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut tidak mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun jika yang terjadi bahwa seorang akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap juga pada skandal yang menimpa Xerox, WorldCom, Tyco, Global Crossing, Adelphia dan Walt Disney (Christiawan, 2005). Sehingga kunci permasalahan tersebut adalah independensi auditor tersebut atau kurangnya tanggung jawab auditor terhadap pendeteksian kecurangan (Saifudin & Ayuningtias, 2020).

Dengan demikian, kompetensi, independensi dan tanggung jawab pendeteksian kecurangan merupakan hal yang penting dimiliki oleh akuntan publik. Bila seorang auditor sudah tidak mampu lagi menjaga independensi, kompetensi dan tanggung jawab pendeteksian kecurangan, maka akan mengakibatkan terjadinya kegagalan audit, sehingga hal tersebut akan berdampak pula pada hilangnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap auditor. Hilangnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap auditor tidak hanya terjadi di luar negeri saja tetapi juga berdampak pada akuntan publik yang ada di Indonesia. Akibatnya, profesi akuntan publik akan mengalami kemunduran.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010) dengan menggunakan subjek yang berbeda yaitu Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Alasan peneliti mereplikasi judul ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari peneliti terdahulu. Adapun perbedaannya ialah dari tempat penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di AKN III BPK RI Jakarta sedangkan penelitian yang sekarang akan dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Jakarta. Perbedaan antara auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditor di AKN III BPK RI ialah Dalam menjalankan pemeriksaan keuangan komersial, KAP pastilah berhubungan dengan perusahaan swasta atau privat. Oleh sebab itu, yang menjadi objek pemeriksaan adalah laporan keuangan entitas atau perusahaan swasta.

Lain halnya dengan pemeriksaan keuangan sektor pemerintah. Objek pemeriksaannya adalah laporan keuangan pemerintah, termasuk juga proses pengelolaan keuangan negara, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Auditor menggunakan suatu standar untuk memeriksa keuangan entitas, baik itu privat ataupun publik. Standar pemeriksaan adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh auditor. Standar pemeriksaan keuangan komersial (KAP) diatur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang dikeluarkan oleh IAI.

Standar pemeriksaan keuangan Negara disusun oleh BPK (menurut UU No. 15 Tahun 2004). Standar pemeriksaan itu disebut dengan SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN tidak hanya berlaku untuk pemeriksaan keuangan, tetapi juga untuk semua pemeriksaan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPAP dan SPKN sama-sama memuat tiga kelompok standar, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, serta standar pelaporan. Isi dari keduanya pun hampir sama. Pemeriksaan bertujuan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Akuntan publik menggunakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) sebagai kriteria pemeriksaan keuangan sektor komersial. Akuntansi pemerintah kita berbeda dengan akuntansi komersial. Ada panduan khusus untuk melaksanakan akuntansi pemerintah karena teknik akuntansinya berbeda dengan akuntansi sektor komersial. Salah satu yang menjadi alasan perbedaan itu adalah tujuan entitas. Entitas privat berorientasi untuk mencari keuntungan, sedangkan pemerintah berorientasi nonprofit. Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan menggunakan dasar SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Untuk saat ini, SAP yang terbaru diundangkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dengan studi kasus di KAP dengan di BPK akan sangat berbeda. Adapun penelitian ini menjadi sangat penting karena pencegahan kegagalan audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena hasil audit laporan keuangan digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil keputusan.

METODE

Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan bantuan software SPSS, yang akan menghasilkan analisis data berupa statistik deskriptif, validitas reliabilitas, dan korelasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (Path Analysis), analisis jalur digunakan untuk menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan klausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Untuk pengujian validitas instrumen penelitian yang berupa skor yang memiliki tingkat (ordinal), yang secara khusus penulis menggunakan skala Likert, rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan koefisien validitas dengan koefisien korelasi *item-total product moment* dari *pearson*:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \quad (1)$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi Product moment

X = skor item

Y = skor total

n = jumlah responden

Nilai koefisien korelasi harus terdapat dalam batasan-batasan $-1 < r < + 1$, dimana:

$r = + 1$ atau mendekati $+ 1$, menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan searah

$r = -1$ atau mendekati -1 , menunjukkan adanya hubungan yang baik

$r = 0$ atau mendekati 0 , menunjukkan tidak adanya hubungan yang kuat atau hubungan yang terjadi lemah

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua *auditor partner* yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Jakarta, dimana terdapat 237 Kantor Akuntan Publik diwilayah Jakarta

yang terdaftar di IAI pada tahun 2012. Sedangkan sampel menurut Sekaran (2011) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang terpilih dari populasi. Untuk keperluan penelitian ini maka akan diambil sampel sebanyak 50 *auditor partner* yang bekerja pada KAP (Kantor Akuntan Publik) di wilayah Jakarta. Dikarenakan populasi dianggap homogen maka pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperlihatkan *strate* yang ada dalam populasi.

Variabel Penelitian

Variabel Independent

Variabel *independent* atau variabel bebas dapat juga dikatakan sebagai variabel X. Adapun dalam Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independent, antara lain: independensi (X1); kompetensi (X2); dan tanggung jawab pendeteksian kecurangan (*responsibility for fraud detection*) (X3).

Variabel independensi terdiri dari 2 indikator utama, yaitu *independence in fact* dan *independence in appearance*. Adapun faktor penilaian indikator *independence in fact*, antara lain: tidak melakukan *overstatement* dan *understatement* dalam laporan keuangan, melaporkan adanya kecurangan dalam laporan keuangan, tidak melakukan *overstated of assets* dan *understated of liabilities*, dan tidak memberikan jasa lain selain jasa laporan keuangan. Sedangkan faktor penilaian indikator *independence in appearance*, antara lain: mengaudit dan menjabat pada perusahaan yang sama, hubungan keluarga dengan klien, ikatan keputusan keuangan, dan hak istimewa berupa pemberian fasilitas.

Variabel kompetensi diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman, sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi yaitu terkait pengetahuan auditor berupa beberapa pengetahuan yang diperlukan auditor untuk meningkatkan kompetensinya diantaranya pengetahuan prinsip akuntansi dan standar audit, pengetahuan jenis industri klien, pengetahuan kondisi perusahaan klien, pendidikan formal yang sudah ditempuh, dan pelatihan serta keahlian khusus (De Angelo, 1981). Indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi selain pengetahuan yaitu terkait pengalaman menurut Tubbs (1992) yang diperlukan auditor untuk meningkatkan kompetensinya terdiri dari: lama melakukan audit, jumlah klien yang sudah diaudit, dan jenis perusahaan yang sudah diaudit.

Variabel tanggung jawab pendeteksian kecurangan mengukur tanggung jawab auditor untuk pendeteksian kecurangan dalam pelaksanaan audit dengan menggunakan indikator menerapkan metode audit, penggunaan alat bantu (*decision aids*), menggunakan sinyal kecurangan (*professional judgment*), skeptisisme profesional dan penilaian resiko kecurangan dalam perencanaan audit (Koroy, 2008).

Variabel Independent

Sekaran (2011) mendefinisikan variabel dependen sebagai variabel terikat dan merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Tujuan dari penggunaan variabel dependen oleh peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya. Melalui analisis terhadap variabel terikat (yaitu, menemukan variabel yang mempengaruhinya), adalah mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah. Variabel dependen atau variabel terikat dapat juga dikatakan sebagai variabel Y. Adapun yang menjadi variabel independent dalam penelitian ini adalah variabel pencegahan kegagalan audit.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencegahan terjadinya kegagalan audit digunakan antara lain: auditor melaporkan temuan pemeriksaan yang material, auditor

memberikan opini atas laporan keuangan yang sesuai kondisi keuangan yang sebenarnya, auditor melakukan pendeteksian kesalahan material, dan kemampuan auditor dalam mengenali kecurangan yang material.

Pengujian dengan Uji Simultan/ Pengujian Hipotesis secara Overall (Uji f)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh dari variabel - variabel bebas secara bersama-sama terhadap suatu variabel tidak bebas digunakan uji f.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari independensi auditor kompetensi auditor dan tanggung jawab pendeteksian kecurangan terhadap pencegahan kegagalan audit.

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari independensi auditor kompetensi auditor dan tanggung jawab pendeteksian kecurangan terhadap pencegahan kegagalan audit. $\alpha = 5 \%$

Statistik Uji:

$$f = \frac{R^2(n - K - 1)}{K(1 - R^2)} \quad (2)$$

Kriteria Uji: 1. Terima Ho jika F hitung < F tabel

Tolak Ho jika F hitung \geq F tabel

F tabel = F_{α} ; (df1, df2) df1 = k, df2 = n - k - 1

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atau suatu variabel tidak bebas digunakan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Independensi Terhadap Pencegahan Terjadinya Kegagalan Audit

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai thitung variabel independensi (3,6302) lebih besar dari ttabel (2,013). Karena thitung lebih besar dibanding ttabel, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa independensi secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta. Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwa semakin independen akuntan publik maka pencegahan terjadinya kegagalan audit akan semakin baik.

Secara langsung independensi memberikan pengaruh sebesar 10,99% terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan kompetensi dan tanggungjawab pendeteksian kecurangan sebesar 11,76 persen. Jadi secara total kontribusi (pengaruh) independensi terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta sebesar 22,75 persen.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan Terjadinya Kegagalan Audit

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai thitung variabel kompetensi (3,9007) lebih besar dari ttabel (2,013). Karena thitung lebih besar dibanding ttabel, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta. Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi akuntan publik maka pencegahan terjadinya kegagalan audit akan semakin baik.

Secara langsung kompetensi memberikan pengaruh sebesar 17,38% terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit dan secara tidak langsung karena hubungannya dengan independensi dan tanggungjawab pendeteksian kecurangan sebesar 14,82 persen. Jadi secara total kontribusi (pengaruh) kompetensi terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta sebesar 32,20 persen.

Pengaruh Tanggungjawab Pendeteksian Kecurangan Terhadap Pencegahan Terjadinya Kegagalan Audit

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat nilai thitung variabel tanggungjawab pendeteksian kecurangan (2,5467) lebih besar dari ttabel (2,013). Karena thitung lebih besar dibanding ttabel, maka dengan tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa tanggungjawab pendeteksian kecurangan secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta. Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tanggungjawab akuntan publik dalam pendeteksian kecurangan maka pencegahan terjadinya kegagalan audit akan semakin baik.

Secara langsung tanggungjawab pendeteksian kecurangan memberikan pengaruh sebesar 7,09% terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit dan secara tidak langsung karena keterkaitannya dengan independensi dan kompetensi sebesar 11,88 persen. Jadi secara total kontribusi (pengaruh) tanggungjawab pendeteksian kecurangan terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta sebesar 18,97 persen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa: hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa independensi secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta. Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwa semakin independen akuntan publik maka pencegahan terjadinya kegagalan audit akan semakin baik. Kemudian, variabel kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta. Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi akuntan publik maka pencegahan terjadinya kegagalan audit akan semakin baik. Serta variabel tanggungjawab pendeteksian kecurangan secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta. Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tanggungjawab akuntan publik dalam pendeteksian kecurangan maka pencegahan terjadinya kegagalan audit akan semakin baik. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, dan tanggungjawab pendeteksian kecurangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI Jakarta. Melalui penjumlahan besar pengaruh ketiga variabel bebas secara parsial diperoleh total pengaruh independensi, kompetensi, dan tanggungjawab pendeteksian kecurangan secara bersama-sama terhadap pencegahan terjadinya kegagalan audit pada Kantor Akuntan Publik diperankan oleh independensi, kompetensi, dan tanggungjawab pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis, maka saran peneliti ini bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan adalah: (a) terkait keterbatasan peneliti, disarankan kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang menggunakan kuesioner

dengan pertanyaan atas suatu kondisi pada tahun tertentu, dan ketika membuat pertanyaan dari kuesioner diharapkan peneliti untuk menyertakan pertanyaan positif dan pertanyaan negatif pada setiap indikator pertanyaan; (b) disarankan kepada peneliti lainnya untuk meneliti unit kerja lainnya selain di KAP atau memperluas sampel penelitian, (c) untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang secara teoritis mempengaruhi pencegahan kegagalan audit, seperti misalnya pembatasan lingkup audit dan skeptisisme profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom). (2002). Siaran Pers Badan Pengawas Pasar Modal, 27 Desember.
- Christiawan, Y. J. (2005). Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan Historis. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 61- 88.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of accounting and economics*, 3(3), 183-199.
- Karyadi, I. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Profesi Auditor pada Kantor Akuntan Publik. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 3(7), 1-16. doi:<http://dx.doi.org/10.30742/equilibrium.v3i7.201>
- Koroy, T. R. (2008). Pendeteksian kecurangan (fraud) laporan keuangan oleh auditor eksternal. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 10(1), 22-23.
- Prasetyo, D. (2010). Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Tanggung Jawab Pendeteksian Kecurangan terhadap Pencegahan Kegagalan Audit (*Audit Failure*). Thesis: Universitas Padjajaran.
- Priyano, S.H. (2018). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. *Parameter*, 1(1), 1-24. doi:<https://doi.org/10.37751/parameter.v2i1.8>
- Purwaningsih, S. (2018). Pengaruh Skeptisisme Profesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan). *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(3), 513-535. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2018.v11i03.010>
- Rahim, S., Sari, R., Wardaningsi, W., & Muslim, M. (2020). Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Skeptisme Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(2), 241-254. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.007>
- Saifudin, S., & Ayuningtias, S. (2020). Dampak Profesionalisme, Independensi, dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor Pada KAP Di Semarang. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(2), 217-228. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.005>
- Setiawan, I. A., & Ghozali, I. (2006). *Akuntansi Keperilakuan: Konsep dan Kajian Empiris Perilaku Akuntan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sheldon, D. R. (1996). *Achieving accountability in business and government: Managing for efficiency, effectiveness, and economy*. Greenwood Publishing Group.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian)*. Salemba Empat, Jakarta.